

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU SARANA PRASARANA SEKOLAH**

<sup>1</sup>Anna Sulfiati, <sup>2</sup>Lusiana, <sup>3</sup>Leni Awaleni

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institute Agama Islam Negeri Bone, Pattiro Bajo  
email : annasulfiati99@gmail.com

### **ABSTRAK**

Implementasi pada dasarnya terkait dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan dapat tercapai dengan berbagai indikator. Hal tersebut terjalin erat dengan aturan dasar kebijakan yang ada agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai program dan tujuan yang dirumuskan. Terdapat permasalahan apabila kebijakan yang ada tidak memberi peluang dan perlindungan mendasar terhadap implementasi program pendidikan. Sarana dan Prasarana Sekolah sendiri merupakan fasilitas pendukung pencapaian target tujuan lembaga pendidikan. Penentuan kebutuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masing-masing sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara mengimplementasikan kebijakan yang ada untuk meningkatkan mutu sekolah, agar dapat diketahui hambatan yg dihadapi sekolah khususnya fasilitas sarana dan khususnya prasarana belum memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan BSNP, tepatnya pada PP. No. 19 tahun 2005 tepatnya Bab V pasal 42 ayat 1 dan 2.

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Peningkatan Mutu Sarana Prasarana*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan wahana dalam membangun watak suatu bangsa. Sistem pendidikan yang baru menuntut fakta dan kondisi baru pula baik yang berkenaan dengan fisik maupun non fisik.<sup>1</sup> Perkembangan zaman sangat pesat tidak dapat dibendung lagi dengan ditandai persaingan yang sangat cepat dan ketat khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan hal tersebut pemerintah dituntut untuk mengadakan pembenahan dan penyempurnaan untuk menyiapkan segala sesuatunya agar mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul, khususnya di bidang pendidikan lewat pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dalam segala bidang, diantaranya peningkatan kualitas pendidik dan pemenuhan sarana-prasarana pendidikan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya tenaga pendidik dan kependidikan yang professional akan mampu

---

<sup>1</sup> Asnawir dan Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hal 17.

membuat suatu ide, perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban terhadap adanya sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas tidak akan mampu berkembang dengan baik tanpa diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang lengkap dan memenuhi alat sesuai kebutuhan.

Adapun yang dimaksud dengan saran pendidikan meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh: gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan lain-lain. Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah. sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai akan mampu memberikan stimulus kepada pelaksana pendidikan dan sasaran pendidikan. Dorongan dan ketertarikan kuat siswa terhadap kelengkapan kualitas sarana dan prasarana akan sangat mampu mendongkrak ketertinggalan pendidikan di sekolah. Tetapi secara riil keadaan sarana pendidikan yang ada di negara kita jika diukur dengan pemenuhan Sarana Prasarana sekolah sesuai amanah undang-undang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Keadaan yang terjadi menunjukkan pemberian bantuan untuk pengadaan bantuan sendiri masih jauh dari standart, karena bangunannya tidak memenuhi standart umum. Sehingga gedung yang baru di bangun cepat pulan roboh. Control dari pihak yang berwenang untuk pelaksana dan penggarap di lapangan harus sesuai rencana yang diajukan. Hal inilah salah satu yang menjadikan upaya untuk mengimplementasikan peningkatan mutu menjadi tidak maksimal.

Menurut Oemar Hamalik, pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) instrinsik dan ekstrinsik. Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujuk Ahmad, bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga ,enghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam perjalanannya kebijakan pendidikan senantiasa berkembang khususnya berlakunya kebijakan pendidikan yang berlangsung saat ini pada jenjang Sekolah Menengah Atas dengan harapan memiliki kemampuan dan kompetensi akademik maupun non akademik, dilandasi oleh kemampuan personal dan sosial yang secara umum disebut kecakapan hidup (life skill). Kecakapan Pendidikan (life skill education) adalah pendidikan yang bermutu, baik quality in fact maupun quality in perception. Hal ini menuntut pemerintah, tokoh, dan pemerhati pendidikan untuk

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal 55

<sup>3</sup> Fajri Dwiyama, 'Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Di MTsN Watampone Kabupaten Bone', *Adaara : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1 (2018), 535–54  
<<http://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1>>.

berkerja ekstra keras memenuhi tujuan pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pergantian pembuat kebijakan yang dianggap sebagai salah satu penentu utama peningkatan mutu pendidikan. Sebenarnya peraturan pemerintah sudah merumuskan langkah atau target yang akan dicapai, tetapi masih bergerak pada proses penyempurnaan administrasi semata belum sampai pada aplikasi secara nyata. Hal ini terumuskan pada Standart pendidikan yang berjumlah delapan sebagai target utama.

Menurut Roger A. Kauffman seperti yang dikutip oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Kesemuanya itu harus didukung oleh segenap lapisan masyarakat mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam segala bidang, dengan cara pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan bidang sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dukungan kebijakan pemerintah mulai pusat sampai daerah, sebab pemerintah yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya UUSPN nomer 20 tahun 2003. sehingga terbitlah UU nomer 33 dan 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Menurut Suharsimi Arikunto “sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam belajar mengajar, abik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.”<sup>4</sup>

Sejalan dengan berjalannya waktu , keadaan menuntut kebutuhan pendidikan harus terpenuhi di balik keadaan ekonomi masyarakat yang terus berubah. Apalagi sekarang ini pemerintah mengadakan “ Sekolah Gratis” yang secara pasti akan memunculkan masalah baru lagi, terutama bidang sarana prasarana sekolah sebagai salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomer 11 tahun 2005 tetang standar nasional pendidikan bahwa hal tersebut kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipenuhi. Lebih khusus lagi yang tercantum pada bab I pasal 1 ayat 8, bahwa Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Depdiknas).

Hal ini yang menjadi landasan utama dalam tesis ini bahwa keberadaan dan pengucuran dana sebagai kebutuhan pokok terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendidikan sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan pada PP No. 19 tahun 2005 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa dengan

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi pendidikan teknologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) hal 83

diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan , maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan pencapaian sekolah atau madrasah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Untuk mengenal lebih dalam tentang sarana dan prasarana dapat dipelajari dan dan dikaji Bab V pasal 42 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 yang berbunyi : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa ; Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Mencermati juga pada PP No. 19 tahun 2005 utamanya bab V pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang sarana dan prasarana.

## **METODE**

Penelitian tesis ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif Model penelitian kualitatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian ini penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek Suatu kondisi suatu sistem pemikiran ataupun Suatu kelas peristiwa pada masa sekarang tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi Gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang muncul serta sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Sekolah**

Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu). Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau

---

<sup>5</sup> F Dwiyama - Adara: Jurnal Manajemen Pendidikan and undefined 2018, "Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu DI MTsN Watampone Kabupaten Bone," *mail.jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.), accessed August 25, 2021, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/viewFile/285/205>.

perumusan kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis (Muhammad Jumhadi dan Wariji 2008).<sup>6</sup>

Kegiatan pendidikan juga harus memenuhi standar nasional pendidikan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005. Ruang lingkup standar nasional pendidikan di jelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang meliputi standar isi, syandar pross, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pendidikan, dalam setiap kegiatan dibutuhkan alat yang dapat membantu kelancaran dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu pemerintah telah menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemetintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 yang berbunyi :

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki srana dan prasaran yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sukmbelr belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang labolatorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, , tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan implementasi sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting harus dipenuhi dalam menunjang sistem pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayaagunaan komponen secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasaran pendidikan. Dalam hal ini guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu alat pengajaran, alat peraga dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatannya dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan.

Guu harud dapat memanfaatkan segala sarana dan prasaran seoptimal mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana yang ada.

---

<sup>6</sup> Arwildayanto dkk, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Cet. 1; Bandung : 2018), hal 77

<sup>7</sup> Standar Nasional Pendidikan (SNP) Perpen Nomor 19 Tahun 2005, (Bandung : Fokusmedia 2005)

Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas dimana dia mengajar. Demikian juga dalam perawatan sarana dan prasarana secara sederhana yang tidak harus membutuhkan keahlian profesional, dapat dilakukan oleh guru.<sup>8</sup>

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tidak langsung begitu saja. Sarana dan prasarana ada tentunya juga melalui beberapa proses yang panjang dan rumit. Dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana juga melalui beberapa proses yang tidak mudah, diantaranya meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Perawatan, Inventarisasi dan Penghapusan. Perencanaan pengadaan harus dirancang dengan benar sebelum pengadaan dilakukan. Bila rencana dari awal sudah matang maka sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh setelah pengadaan. Perencanaan dilakukan setelah meneliti kembali perlengkapan yang dibutuhkan. Pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya kegiatan belajar mengajar sudah selazimnya dalam proses pengadaan benar-benar memperhatikan terhadap kebutuhan paling pokok dalam menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademik. Hal tersebut dilakukan supaya sarana dan prasarana yang ada selalu dalam kondisi baik dan tidak mudah rusak. Akan tetapi itu semua juga petu kesadaran dari seluruh peronel yang ada disekolah ini supaya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.

#### **B. Hambatan Yang dihadapi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Sekolah**

Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota.

Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya alokasi dana yang terhambat karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum tertentu. Dan faktor lainnya adalah perawatan yang buruk bisa saja terjadi karena pihak sekolah tidak terlalu memperhatikan bagaimana merawat sarana dan prasarana yang telah diberikan, sikap acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai. Akibatnya para peserta didik tidak nyaman menggunakan fasilitas karena kondisinya banyak yang rusak.

Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak yaitu.

---

<sup>8</sup> Soetjipto dan Raffles Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999) hal 172-174

1. Rendahnya mutu output pendidikan

Minimnya sarana ini menyebabkan generasi muda yang hanya mengandalkan teori tanpa adanya realisasi yang nyata dalam belajar. Mereka hanya belajar dalam angan-angan yang keluar dari realitas yang sesungguhnya. Kurang terpenuhinya fasilitas pendidikan seperti kerusakan sekolah, laboratorium, dan lain-lain menimbulkan anak didik susah memahami pelajaran tersebut.

Contohnya dalam belajar biologi tentang jenis-jenis bakteri, tentunya kita pasti akan membutuhkan laboratorium agar mengetahui bentuk bakteri secara nyata menggunakan mikroskop.

Jika laboratorium dan perlengkapan tidak tersedia rasanya kita akan kurang memahami jenis bakteri itu seperti apa jika kita hanya melihatnya melalui buku paket/internet karena hanya bisa berangan-angan.

2. Kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang

Sarana pendidikan yang dimaksud disini bukan hanya laboratorium, perpustakaan, ataupun peralatan edukatif saja, tetapi juga sarana olahraga ataupun kesenian untuk mengekspresikan diri mereka. Pelajaran saat ini tentunya membutuhkan ruang gerak dalam kematangan emosi, misalnya grup band, sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak terpenuhi cenderung akan membuat perkumpulan yang menyalahi norma.

Dengan adanya koordinasi tersebut selanjutnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan output pendidikan tentunya kita harus meningkatkan harga maksudnya adalah meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, yang meliputi :

1. Sarana Fisik

Sarana fisik diperlukan untuk pemenuhan pembangunan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, sarana-sarana olahraga seperti lapangan basket dan perlengkapannya, alat-alat kesenian seperti studio musik, dan fasilitas lainnya. Jika sarana belajar tersebut terpenuhi, tentunya akan semakin memudahkan peserta didik dalam transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Sarana Non Fisik

Sarana non fisik ini maksudnya jika sistem dan pengajaran yang dilakukan itu bermutu, maka akan mempercepat pembangunan nasional. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pengajar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hartoni, *Implementasi Manajemen sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan*, dalam [http://www.researchgate.net/publication/328339023\\_Implementasi\\_Manajemen\\_Sarana\\_dan\\_Prasarana](http://www.researchgate.net/publication/328339023_Implementasi_Manajemen_Sarana_dan_Prasarana), 19 Juni 2020.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian implementasi kebijakan Peningkatan mutu sarana prasarana sekolah telah dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan : 1) Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster, yakni to implement (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu). Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis (Muhammad Jumhadi dan Warji 2008). 2) Sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pendidikan, dalam setiap kegiatan dibutuhkan alat yang dapat membantu kelancaran dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh peralatan yang cukup memadai, sehingga tujuan itu dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu pemerintah telah menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 yang berbunyi : a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, , tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3) Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah masalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan. Banyak sekali peserta didik yang tidak bisa menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. 4) Akibatnya para peserta didik tidak nyaman menggunakan fasilitas karena kondisinya banyak yang rusak. Hal tersebut menimbulkan beberapa dampak yaitu. a) Rendahnya mutu output pendidikan, b) Kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka disampaikan saran sebagai berikut: 1) Sebaiknya dalam mengimplementasikan sarana dan prasarana hendaknya ditangani oleh orang yang benar-benar ahli mengelola sarana dan prasarana tersebut. 2) pemerintah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di desa terpencil sehingga peserta didik dapat belajar bukan hanya menggunakan teori saja tetapi juga bisa mempraktekannya menggunakan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asnawir dan Usman Basyiruddin. 2002. *Media Pembelajaran*, Jakarta: Ciputat Press.
- DWIYAMA, FAJRI. “MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM PENINGKATAN MUTU DI MTsN WATAMPONE KABUPATEN BONE.” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (June 1, 2018): 535–554. Accessed July 13, 2019. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/view/285>.
- Pendidikan, F Dwiyama - *Adaara: Jurnal Manajemen*, and undefined 2018. “Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu DI MTsN Watampone Kabupaten Bone.” *mail.jurnal.iain-bone.ac.id* (n.d.). Accessed August 25, 2021. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/adara/article/viewFile/285/205>.
- Arikunto, Suharsimi *Organisasi dan Administrasi pendidikan teknologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arwildayanto dkk. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan* , Bandung.
- Standar Nasional Pendidikan (SNP) Perpen Nomor 19 Tahun 2005, Bandung : Fokusmedia
- Soetjipto dan Kosasi Raflis. 1999. *Profesi Keguruan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hartoni, *Implementasi Manajemen sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan*, dalam [http://www.researchgate.net/publication/328339023\\_Impelementasi\\_Manajemen\\_Sarana\\_dan\\_Prasarana](http://www.researchgate.net/publication/328339023_Impelementasi_Manajemen_Sarana_dan_Prasarana), 19 Juni 2020